

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Latif, 2024, *Sumber Kewenangan Hukum Administrasi Pemerintahan*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Agus Rahardjo, 2018, *Mewujudkan Pengadaan yang Bersih dan Akuntabel*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Budi Santoso, 2020, *Good Governance dan Reformasi Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Elisabeth Nurhaini Butar Butar, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Eny Kusdarini, 2020, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UNY Press
- F. Soegeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, Yogyakarta: Penerbitan UAJ.
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati, 2018, *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hans Kelsen. *Pure Theory of Law*. Terjemahan Raisul Muttaqien, 2008, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Cetakan Keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Indra Bastian, 2017, *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Yogyakarta: BPFE.
- Indroharto, 2006, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: PT Pustaka Utama
- Indroharto, 2019, *Pengadaan Barang dan Jasa dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press.

- Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: Alumni
- Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Jimly Asshiddiqie, 2016, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika
- Jimly Asshiddiqie, 2015, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konpress.
- Johny Ibrahim, 2016, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jawa Timur: Bayu Media Publishing.
- Juliansyah Noor, 2017, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Ni'matul Huda, 2018, *Hukum Administrasi Negara Kontemporer*, Malang: Setara Press.
- Prasojo, Eko, 2014, *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Prajudi Atmosudirjo, 1995, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ridwan H.R, 2011, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ridwan H.R, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Salim H.S., dan Erlis S.N, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Salim H.S dan Erlies S.N, 2017, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Salim H.S, 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sihombing M. D, 2021, *Hukum Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah*, Jakarta: Prenadamedia Group

Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sri Soemantri Martosoewignyo, 2017, *Asas-Asas Good Governance dalam Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Alumni.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.

Wahyudi Kumorotomo, 2019, *E-Government dan Reformasi Birokrasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Wahyudi Kumorotomo, 2019, *Etika Publik: Prinsip-Prinsip Administrasi Negara yang Berorientasi Etis*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

World Bank, 2017, *World Development Report 2017: Governance and the Law*, Washington.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal dan Tesis

Cecep, T.S., dan Wiryanto Sultan. "Optimalisasi dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Jurisdictie* 5, no. 2 (2023): 1–25.

Mutiah, Siti. "Analisis Risiko Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Katalog." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 17, no. 3 (2022): 112–128.

Setiawan, dan Harjanto. "Efektivitas Implementasi E-Katalog dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah." *Jurnal Administrasi Publik* 15, no. 2 (2021): 45–60.

Widhi, B. "Efektivitas Layanan E-Catalogue oleh Direktorat Pasar Digital Pengadaan pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)." *Journal of Politic and Government Studies* 13, no. 1 (2023): 31–43.

C. Peraturan Perundangan

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik.

D. Internet/ Website

Kompas. "Fakta Korupsi Kepala Basarnas, Diduga Terima Suap Rp. 88 Miliar." Diakses pada 17 Februari 2025. <https://www.ngopibareng.id/read/fakta-korupsi-kepala-basarnas-diduga-terima-suap-rp-88-miliar>.

LKPP. "SIARAN PERS NOMOR: 9/SP-Ses.3/03/2024 Sistem E-Katalog Versi 6.0 LKPP Resmi Meluncur, Lebih Responsif, Bisa Lacak Pengiriman dan Pembayaran." lkpp.go.id, diakses pada 13 Februari 2025. <https://www.lkpp.go.id/read/s/siaran-pers-sistem-e-katalog-versi-6-0-lkpp-resmi-meluncur-lebih-responsif-bisa-lacak-pengiriman-dan-pembayaran>.